

Kalimantan Selatan Buat Jambore Aksi Bersih Sampah Sungai Martapura Pada Hari Peduli Sampah Nasional 2023



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/360900/kalsel-buat-jambore-aksi-bersih-sampah-sungai-martapura-pada-hpsn-2023>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membuat aksi jambore bersih sampah sungai Martapura pada puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2023. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana di Banjarmasin, Minggu, puncak HPSN di Kalsel digelar pada 24 Februari 2023. “Giat jambore bersih sampah sungai Martapura akan dilaksanakan di 20 titik lokasi, secara serentak,” paparnya.

Menurut dia, HPSN sebenarnya jatuh pada 21 Februari 2023, namun Pemprov Kalsel melaksanakan puncaknya pada 24 Februari 2023, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat untuk bersih-bersih lingkungan dan sungai.

Menurut Hanifah, HPSN menjadi momentum penting untuk mengingatkan bahwa persoalan sampah sampai saat ini masih menjadi isu strategis yang belum bisa diselesaikan dengan baik. “Melihat dari kejadian yang melatarbelakangi lahirnya HPSN, bagaimana ketika sampah tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan korban. Semoga dengan peringatan HPSN ini di Kalsel dapat membangun kesadaran masyarakat untuk peduli dengan sampah,” ujarnya.

Dinyatakan Hanifah, DLH Kalsel sendiri sudah memulai kegiatan untuk peringatan HPSN pada 15 Februari 2023 melalui sosialisasi di lokasi percontohan

program Sungai Martapura Asri, di mana memiliki 12 lokus untuk diberikan sosialisasi mengelola sampah. Saat puncak peringatan HPSN ini, kata Hanifah, di Taman Teluk Kelayan Banjarmasin dilakukan juga penandatanganan MoU antara bank sampah induk dengan bank sampah Martapura Asri serta penanaman pohon, penyerahan gugus apung, juga MoU DLH Kalsel dengan Bank Kalsel. “Kita berharap ada dukungan dari Bank Kalsel untuk membangun kesadaran masyarakat didalam pengelolaan sampah khususnya di program prioritas DLH,” ujarnya.

Lebih lanjut, dikatakan Hanifah, media sosial sendiri menjadi alat penting untuk sosialisasi, oleh karena itu pihaknya melakukan challenge, berharap anak muda atau masyarakat yang aktif di media sosial bisa memahami bagaimana pentingnya dalam mengelola sampah.

“Selain itu kita ada challenge mengumpulkan foto atau video dengan durasi tiga menit menggambarkan kegiatan-kegiatan di Martapura Asri serta challenge generasi muda peduli sampah atau lingkungan dengan membuat quote terkait HPSN. Paling tidak akan timbul kesadaran dan kepedulian tentang sampah,” katanya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/360900/kalsel-buat-jambore-aksi-bersih-sampah-sungai-martapura-pada-hpsn-2023>, 19 Februari 2023.
2. <https://kalimantanpost.com/2023/02/hpsn-2023-pemprov-kalsel-lakukan-aksi-jambore-bersih-sampah-sungai/>, 25 Februari 2023.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

- c. sampah spesifik.
Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- 3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)
- a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))
Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. daur ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 - b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))
Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (!));

- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.(Pasal 10 ayat (1))
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(Pasal 11)

5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)